



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**WEB SEMINAR BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DPR RI, *INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU)*, DAN *UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK (UN SDSN)*
*“PARLIAMENTARIANS ON COVID-19 AND GENDER EQUALITY”***

Tahun sidang : 2019 – 2020
Masa persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Konsultasi
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juli 2020
Pukul : 19.00 – 21.00 WIB
Tempat : Virtual

Acara : Web Seminar Parliamentarians on COVID-19 and Gender Equality”

Moderator : Kirsten Brosbol (Founder, Parliamentarians for SDGs)

Hadir :

A. NARASUMBER

1. Jeffrey D. Sachs (President, SDSN)
2. Silvana Koch-Merin (President, WPL)
3. Maria Fernanda Espinosa (Former President, UNGA)
4. Gabriela Cuevas (President, IPU)
5. Pumzile Mlambo-Ngcuka (Executive Director, UN Women)

B. ANGGOTA DPR RI

1. Lasmi Indaryani, S.E (F-PD)

C. SEKRETARIAT KERJA SAMA ORGANISASI INTERNASIONAL

1. Endah T.D Retnoastuti
2. Chairil Patria

D. TENAGA AHLI BKSAP

1. Masyithoh Annisa Ramadhani

I. PEMBUKAAN

1. Virtual Webinar dibuka oleh Ms. Kirsten Brosbol (Founder, Parliamentarian for SDGs) pada pukul 19.00 WIB.

II. PRESENTASI PANELIS

1. **Silvana Koch-Merin**, Presiden, Women Political Leader (WPL) menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Beberapa negara yang dipimpin oleh Perempuan secara relatif lebih baik dalam penanganan COVID-19, seperti Jerman, Islandia, Norwegia, dan Selandia Baru. Para pemimpin tersebut selain dapat mengambil keputusan secara cepat, juga lebih memiliki empati dan menjaga informasi tetap terbuka.
 - b. Para politisi pria juga harus lebih terbuka terhadap kemampuan politisi perempuan dalam menangani krisis.
2. **Maria Fernanda Espinosa**, Former President, UNGA menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan apapun, baik dalam jangka panjang maupun pendek, harus melibatkan perempuan dalam prosesnya.
 - b. Kita cukup tertinggal dalam beberapa pencapaian SDGs, termasuk kesetaraan perempuan, dan hal ini diperburuk oleh wabah COVID-19.
 - c. Kita perlu lebih banyak wanita yang terlibat dalam politik dan pengambilan keputusan.
 - d. Para anggota parlemen harus memastikan regulasi yang dihasilkan mempertimbangkan keseimbangan dan perlindungan berbasis gender.
3. **Mr. Jeffrey Sachs**, President, SDSN menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Kita harus memastikan ketimpangan baik yang berdasarkan kekayaan, status sosial maupun gender dikurangi.
 - b. Banyak pemimpin perempuan berhasil dalam menangani pandemi COVID-19.
 - c. Kita harus mendorong kesetaraan dan lebih mendengar suara perempuan termasuk yang sedang memegang jabatan politik dan kepemimpinan.
4. **Ms. Gabriela Cuevas**, President, IPU menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Pandemi Global telah membuka bias dalam kebijakan yang tidak adil terhadap perempuan.
 - b. Perempuan terdampak secara lebih buruk akibat pandemi akibat kebijakan yang bias gender selama ini dan permasalahan ini harus segera diselesaikan. Contoh nyatanya adalah perempuan tidak memperoleh perlindungan sosial yang memadai dan gaji yang lebih rendah.

- c. Dalam hal akses terhadap akses dan piranti digital, perempuan secara relatif lebih rendah daripada pria.
 - d. Solusi dari permasalahan ini adalah aksi afirmatif yang memastikan keterwakilan perempuan di parlemen untuk memastikan regulasi, anggaran, dan pengawasan yang lebih baik dan memastikan kebijakan yang dilaksanakan lebih baik di masa depan.
5. **Pumzile Mlambo-Ngcuka**, Executive Director, UN Women menyampaikan sebagai berikut:
- a. Perempuan harus terwakili secara baik dalam lembaga-lembaga internasional, terutama yang bersentuhan dengan kepentingan perempuan.
 - b. Pandemi menunjukkan kepada kita ketidakadilan berbasis gender yang telah terjadi selama ini.
 - c. UN Women telah berupaya mengingatkan kembali, terutama kepada para pengambil keputusan bahwa perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi akibat pandemik dan mendorong agar kebijakan yang diambil mencerminkan keadilan gender.
6. **Lasmi Indaryani**, Anggota BKSAP, Fraksi Demokrat menyampaikan sebagai berikut:
- a. Di banyak negara perempuan memiliki banyak tanggung jawab baik dalam ranah publik maupun privat.
 - b. 70% tenaga kesehatan dunia adalah perempuan.
 - c. Kita harus memastikan bahwa para tenaga kesehatan tersebut mendapatkan upah yang layak maupun dukungan psikologis yang memadai.
 - d. 8,5 juta perempuan yang menjadi pekerja rumah tangga tidak memiliki kontrak yang layak dan rentan terhadap eksploitasi maupun kekerasan.
 - e. Parlemen dengan wewenang yang dimiliki wajib untuk mencari penyelesaian terhadap permasalahan berbasis gender ini dan memastikan perempuan mendapatkan manfaat yang sama dari kebijakan yang dihasilkan.

III. KESIMPULAN

1. Seperti berbagai agenda internasional lainnya, isu kesetaraan gender juga perlu kerja sama dari berbagai pihak.
2. Solidaritas dan kerja sama merupakan kunci dalam pencapaian tujuan kesetaraan gender.
3. Banyak pemimpin perempuan berhasil dalam menangani pandemi COVID-19. Sebagai contoh: Angela Merkel (Kanselir Jerman), Jacinda Ardern (PM Selandia), Tsai Ing Wen (Taiwan), Erna Solberg (Norwegia), dan lain lain.

4. Masih kurangnya representasi perempuan baik di parlemen maupun jabatan dan pengambilan keputusan publik merupakan sesuatu yang harus diselesaikan sesegera mungkin.
5. Para anggota parlemen harus memainkan peran mereka semaksimal mungkin dalam memajukan agenda kesetaraan jender.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 21.00 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat



Chairil Patria, S.IP., M.Si.
NIP. 197111051998031002